

## **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi**

**Vinny Siti Utary**  
Universitas Muhammadiyah Sukabumi  
vinnysitiutary@gmail.com

---

### **ABSTRACT**

*The research aims to know the influence of the income whether the Local Own Revenue (PAD) and the Special Allocation Fund (DAK) have a positive effect towards On Capital Expenditure Regional Government of Sukabumi City. The method used in this research is assosiatif and descriptive method. Data collection techniques in this research is secondary data, and the methods used are documentation. The sample in this study is the Budget Realization Report (LRA) Regional Government of Sukabumi City from 2016-2018 using 36 samples of data, research tools used were multiple linier regression.*

*The result of this aims can be concluded that the Local Own Revenue (PAD) have a positive and significant impact On Capital Expenditure Regional Government of Sukabumi City.*

**Keywords: Local Own Revenue (PAD and Capital Expenditure.**

\

## I. PENDAHULUAN

Setiap daerah yang berada di wilayah Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Akan tetapi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan sebagian dibantu oleh pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan peraturan tersebut pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang yang luas untuk menggunakan sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 53 menjelaskan bahwa “Belanja modal

merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan serta pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya”.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) sebagai petunjuk dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD..

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik dan kenyamanan masyarakat.

Pada pelaksanaan belanja modal tersebut pemerintah daerah membutuhkan dana dari daerahnya sendiri yaitu Pendapatan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan pendapatan daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pelaksanaan belanja modal.

Sejalan dengan kewenangan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah.

Berdasarkan panuturan diatas menjelaskan bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada setiap daerah untuk

mampu memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Namun, pada realitanya tidak semua daerah mampu sepenuhnya lepas dari ketergantungan pada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga menimbulkan ketidakseimbangan kondisi keuangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh sebab itu pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.

Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah

untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah salah satunya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa DAK merupakan “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

DAK ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat yaitu digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk

mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk kegiatan fisik.

Berikut adalah data realisasi belanja modal Kota Sukabumi pada tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 – 2018 (dalam Rp Juta)**

TAHUN	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (%)
2016	249.182.132.932	205.502.294.155	82,47%
2017	265.150.990.026	217.077.378.623	81,87%
2018	175.634.676.528	140.100.688.338	79,77%

**Sumber : BPKD Kota Sukabumi, Tahun 2019**

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat pencapaian belanja modal dari tahun 2016-2018 mengalami hasil yang cukup baik berkisar dari 70 sampai 80%, hampir memenuhi target yang diberikan oleh pemerintah daerah. Namun pada tahun 2018 realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar 79,77%. Penurunan belanja modal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya PAD yang salah satu sumbernya berupa pajak dan retribusi yang tingkat pemungutannya masih belum optimal serta adanya Peraturan Walikota tahun 2018 yang

menghapus retribusi angkot menjadi salah satu berkurangnya pendapatan yang dihasilkan daerah sehingga berdampak pada aktivitas belanja modal yang salah satu sumbernya dari PAD. Rendahnya penyerapan anggaran belanja modal suatu daerah akan berdampak pada daerah itu sendiri salah satunya yakni infrastruktur yang kurang memadai akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat akan pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah.

Adapun fenomena yang terkait dengan penjelasan sebelumnya yaitu pada

tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan karena diberlakukannya Peraturan Walikota yang menghapus retribusi angkot. PAD tahun 2018 yang mengalami penurunan tersebut berdampak terhadap pelaksanaan belanja modal yang juga menurun pada tahun 2018. Pemerintah Kota Sukabumi untuk mengganti PAD tersebut jajarannya akan mencari potensi atau menaikkan PAD dari sektor lain ([portal.sukabumi.go.id](http://portal.sukabumi.go.id)).

Berdasarkan pemahaman dan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi”.

## **II. KERANGKA TEORITIS Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Ahmad Yani (2013:51) menjelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Menurut Windhu (2018:150) menjelaskan bahwa “PAD merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi daerah tersebut secara luas, nyata dan bertanggung jawab”.

Menurut Sirajuddin, et al (2016:110) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan “pendapatan daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah”.

## **Belanja Modal**

Menurut Erlina et al (2013:155) “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan serta aset tak berwujud”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa “Belanja modal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya”.

Sedangkan menurut Kementerian Keuangan (2012) telah menjelaskan

pengertian belanja modal menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bahwa “Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset atau investaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset”.

## **HIPOTESIS**

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

$H_1$  : terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

## **III. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih.

### **Populasi**

Menurut Sugiyono (2017:81) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka yang dijadikan populasi pada penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2017:81) menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non Probability Sampling* dengan teknik *Sampling Purposive*.

Pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Data yang dianalisis yaitu selama tiga tahun periode 2016-2018 dengan jumlah sampel sebanyak dua belas bulan. Maka jumlah sampel penelitian keseluruhannya adalah  $3 \times 12$  bulan = 36 data.

### **Jenis dan Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2016:137) “Sumber data merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara)
- b. Observasi

- c. Dokumentasi
- d. Riset Internet (Online Research)

### **Objek Penelitian**

Sugiyono (2014:20) menjelaskan bahwa “Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik”. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tiga objek yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu Belanja Modal sebagai variabel terikat (*dependent variable*) dan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel bebas (*independent variable*).

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau

sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2017:147). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari ekonomi daerah itu sendiri yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Adapun hasil perhitungan rasio pendapatan asli daerah Kota Sukabumi tahun 2016 – 2018 sebagai berikut:

**Tabel 4,1**  
**Rasio Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016-2018**  
 Dalam Presentase

BULAN	TAHUN		
	2016	2017	2018
Januari	6,43	37,06	35,93
Februari	36,06	38,55	47,83
Maret	40,25	49,13	47,83
April	40,98	58,40	51,40
Mei	54,02	63,27	58,59
Juni	63,69	67,01	65,89
Juli	64,70	68,83	56,70
Agustus	78,37	69,90	85,76
September	93,47	72,74	34,36
Oktober	90,46	79,45	72,42
November	107,13	80,22	35,28
Desember	75,81	102,73	104,65

*Sumber : Data diolah oleh Penulis, tahun 2019*

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi mengalami perkembangan pada setiap tahunnya. Rata-rata realisasi PAD yaitu sebesar 62,09%. PAD mengalami kenaikan tertinggi pada bulan November tahun 2016 yaitu mencapai 107,13%. Sedangkan nilai terendah yaitu pada bulan Januari tahun 2016 sebesar 6,43%. PAD rata-rata setiap bulannya sangat bervariasi. Hal ini disebabkan pendapatan yang diterima dari

pajak dan retribusi tidak disiplin dalam pemungutannya.

### **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Adapun hasil perhitungan rasio belanja modal Kota Sukabumi tahun 2016–2018 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Rasio Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016-2018**  
Dalam Presentase

BULAN	TAHUN		
	2016	2017	2018
Januari	4,82	23,05	4,50
Februari	4,38	24,20	5,89
Maret	5,33	26,52	20,05
April	7,99	37,44	21,59
Mei	15,82	84,76	27,27
Juni	23,31	52,38	34,03
Juli	28,03	57,98	35,71
Agustus	42,69	64,11	34,06
September	59,51	104,37	55,88
Oktober	77,99	52,39	62,58
November	78,81	48,51	84,51
Desember	110,56	85,62	90,53

*Sumber : Data diolah oleh Penulis, tahun 2019*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rasio Belanja Modal Kota Sukabumi mengalami perkembangan yang fluktuatif pada setiap tahunnya. Rata-rata realisasi belanja modal yaitu sebesar 42,52%. Belanja modal mengalami kenaikan tertinggi pada bulan Desember tahun 2016 yaitu mencapai 110,56%.

Sedangkan kondisi terendah terjadi pada bulan Februari tahun 2016 yaitu 4,38% yang menunjukkan bahwa tidak ada realisasi belanja modal pada awal bulan tersebut.

Sehingga apat disimpulkan bahwa selama tiga tahun terakhir belanja modal Kota Sukabumi mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada bulan Februari tahun 2016 Kota Sukabumi memiliki realisasi

terendah yaitu 4,38%. Disebabkan pemerintah daerah masih merumuskan dan mendiskusikan dengan aparat pemerintah daerah lainnya untuk melaksanakan kegiatan pembelanjaan yang telah

digunakan pada bulan sebelumnya. Oleh karena itu pada akhir tahun pemerintah masih melakukan pembelanjaan yang masih tertunda pada bulan sebelumnya

## Uji Normalitas

**Tabel 4.4**  
**Hasil Pengujian Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>			
		<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Belanja Modal</b>
N		36	36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,6209	,4437
	Std. Deviation	,22779	,30385
Most Extreme Differences	Absolute	,084	,121
	Positive	,073	,121
	Negative	-,084	-,094
Test Statistic		,084	,121
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>	,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			

*Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 4.0*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas dapat disimpulkan telah terpenuhi, hal ini ditunjukkan oleh nilai *Asymp* untuk variabel

pendapatan asli daerah 0,200 dan belanja modal 0,200. Maka hal ini menunjukkan nilai signifikan (*sig*) lebih besar dari 0.05 (*a*).

## Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.5**  
**Hasil Pengujian Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

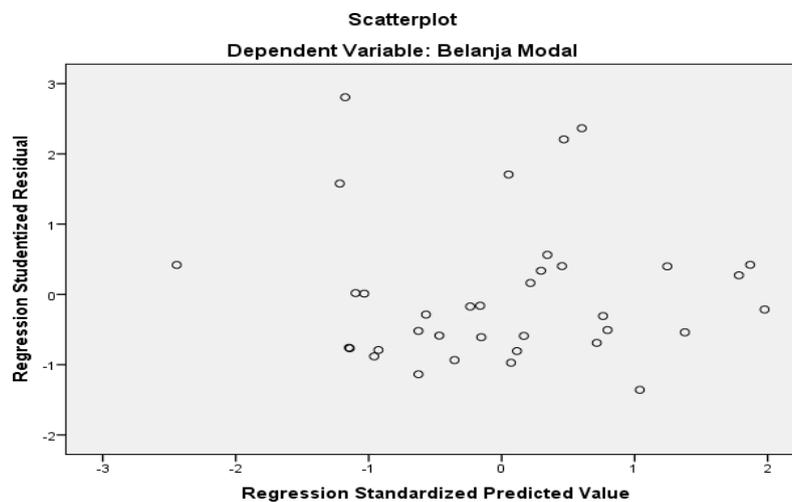
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pendapatan Asli Daerah	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 4.0

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan masalah multikolinearitas dalam model regresi yang akan dibentuk, dikarenakan seluruh variabel bebas yang dilibatkan dalam model regresi memiliki nilai *Tol* yang lebih besar dari 0,10 serta nilai *VIF* kurang dari 10, sehingga asumsi untuk terbebas dari masalah multikolinearitas telah terpenuhi.

## Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 4.1**  
**Grafik Scatterplot Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar grafik di atas ini menunjukkan bahwa dalam model dapat dilihat bahwa titik menyebar secara regresi yang akan dibentuk telah terbebas acak dan tidak membentuk sebuah pola. Hal dari masalah heteroskedastisitas.

## Uji Regresi Linier Berganda

**Tabel 4. 6**  
**Hasil Pengujian Regresi Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,095	,115		-,832	,411
	Pendapatan Asli Daerah	,868	,174	,651	4,999	,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 4.0

Persamaan regresi yang menjelaskan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal adalah sebagai berikut:

$$Y = -0,095 + 0,868 X_1$$

Berdasarkan perhitungan persamaan regresi linear berganda diatas dapat dilihat bahwa konstanta sebesar - 0,095 yang menunjukkan nilai prediksi rata-rata pendapatan asli daerah secara

simultan pengaruhnya adalah 0 (nol). Koefisien regresi Jika Pendapatan Asli Daerah naik maka Belanja Modal akan naik sebesar 0,868 dan sebaliknya jika PAD turun maka Belanja Modal akan turun.

### Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Adapun hasil pengujian hipotesis parsial (uji t) dirangkum sebagai berikut:

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal**

Model	t hitung	t tabel	A	Sig.t	Keputusan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	4,999	2,035	0,05	0,000	Ditolak	Signifikan

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 4.0

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan  $t_{hitung}$  dari variabel

Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) sebesar 4,999 dengan tingkat signifikan 0,000. Nilai  $t_{hitung}$

4,999 >  $t_{\text{tabel}} 2,035$  dan nilai signifikan 0,000 > 0,05. Sehingga dapat diputuskan untuk menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$  yang berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Dimana semakin tingginya Pendapatan Asli Daerah maka terjadi peningkatan Belanja Modal.

### Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,369	1	1,369	24,993	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1,862	34	,055		
	Total	3,231	35			
a. Dependent Variable: Belanja Modal						
b. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah						

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 4.0

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis simultan (uji F) dengan nilai  $F_{\text{hitung}} 24,99 > F_{\text{tabel}} 4,13$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

### Koefisien Determinasi

**Tabel 4.9**  
**Pengujian Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,651 <sup>a</sup>	,424	,407	,23404	1,541
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah					
b. Dependent Variable: Belanja Modal					

Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS 4.0

Perhitungan koefisien determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

$r^2$  = Koefisien korelasi

Sehingga diketahui koefisien

determinasinya adalah sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,651)^2 \times 100\%$$

$$Kd = 0,423801 \times 100\%$$

## REFERENSI

Erlina, Omar dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta : Salemba Empat.

Ghazali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Undip.

Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintahan Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta : Salemba Empat.

Latan, Hengky dan Selva Temelaagi. 2013. *Analisis Multivariate Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*. Bandung : Alfabeta.

$$Kd = 42,38\%$$

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa koefisien determinasi yang diperoleh besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal sebesar 0,651. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara simultan memberikan pengaruh sebesar 42,38%. Sedangkan sebanyak 57,62% merupakan sisa dari besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor – faktor lainnya.

Putra, Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV.

Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.

....., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 tentang Belanja Modal.

....., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 53 tentang Belanja Modal.

....., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

....., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 tentang Pendapatan Daerah.

....., Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah